



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NURUL HUDA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 70784

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 950.000.000

1. Tanah Seluas 175 m2 di JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 883 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 930 m2 di JEMBER, WARISAN Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 135.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 4.800.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 33.011.337

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.122.811.337

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.122.811.337

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.